

---

## DAMPAK IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP SOSIAL EKONOMI LINGKUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MAHAU LESTARI DESA SUNGAI PENOBAN PROVINSI JAMBI

Muhammad Zuhdi<sup>1\*</sup>, Citra Rahmatia<sup>2</sup>, Riko Kurniawan<sup>3</sup>

<sup>\*1,2,3</sup> *Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Jambi*

*E-mail: [edisnt06@gmail.com](mailto:edisnt06@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [Citrarahmatia@gmail.com](mailto:Citrarahmatia@gmail.com)<sup>2</sup>, [Kurniawanriko86@gmail.com](mailto:Kurniawanriko86@gmail.com)<sup>3</sup>*

---

### **Abstract**

*Social forestry is a technique of sustainable forest control finished with the aid of nearby or indigenous corporations in areas particular as nation or regular forests, which aims to improve community welfare, but still maintain forest sustainability and environmental balance, as well as socio-cultural dynamics. This research aims to understand the management system and social, financial and environmental benefits of social forestry for Mahau Lestari wooded area Farmer agency (KTH) members in Sungai Penoban Village, Batang Asam District, West Tanjung Jabung Regency, Jambi Province. This study used a purposive sample approach to identify 16 respondents. The study takes an exploratory and descriptive-analytical approach, with records accrued through interviews and focus group discussion. Social Forestry has a positive impact on society in various aspects. The social impact on this forest farmer group is in the form of increasing knowledge of social forestry activities to manage forests. Changes in community behaviour by clearing land without burning and being responsible in protecting forest areas. The perceived economic impact is a contribution to farmer household income of 7.62%. The environmental impact is seen through planting activities with an agroforestry system, and illegal logging is reduced because the community implements a routine patrol system.*

**Keywords**— *social forestry, impact, socio, economic, environment*

---

### **Abstrak**

Perhutanan sosial merupakan pendekatan pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dengan sumber daya masyarakat sekitar atau masyarakat adat di kawasan hutan negara atau hutan adat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem pengelolaan dan manfaat sosial, finansial, dan lingkungan dari perhutanan sosial bagi peserta Usaha Tani Kawasan Hutan (KTH) Mahau Lestari di Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Penelitian ini melibatkan 16 orang yang dipilih secara *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode eksploratif dan deskriptif analitis, dengan pengumpulan informasi melalui wawancara dan *focus group discussion*. Perhutanan Sosial memberikan dampak positif terhadap masyarakat pada berbagai aspek. Dampak sosial pada kelompok tani hutan ini berupa peningkatan pengetahuan terhadap kegiatan perhutanan sosial untuk mengelola hutan. Perubahan perilaku masyarakat dengan membuka lahan tanpa membakar dan bertanggung jawab dalam menjaga kawasan hutan. Dampak ekonomi yang dirasakan yaitu adanya kontribusi pendapatan rumah tangga petani sebesar 7,62 %. Dampak lingkungan terlihat melalui kegiatan penanaman dengan sistem agroforestry dan tingkat kebakaran hutan dan pelaku pembalakan liar berkurang karena masyarakat menerapkan sistem patroli secara rutin.

**Kata kunci**— *perhutanan sosial, dampak, sosial, ekonomi, lingkungan*

---

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, “hutan merupakan perangkat ekosistem yang tersusun atas tanah dan sumber daya alam, terutama kayu, dalam satu kesatuan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain”. Hutan diklasifikasikan berdasarkan fungsinya menjadi beberapa jenis, yaitu hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi, yang mewakili fungsi dan tujuannya menurut klasifikasi nasional.

Sesuai dengan Pasal 23 UU No. 41/1999, “hutan sebagai sumber daya nasional perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau perorangan tertentu”. Maka dari itu, pemanfaatan hutan harus dilakukan secara merata dengan melibatkan masyarakat, sehingga lembaga-lembaga dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Dalam sudut pandang pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, hutan beserta kandungan keanekaragaman hayatinya dengan manusia merupakan kesatuan ekosistem tak terpisahkan (Santoso et al..2021).

Hutan merupakan sumber daya terbarukan yang memerlukan pengelolaan yang efisien dan efektif. Hutan harus dikelola dengan baik, dengan mempertimbangkan semua unsur penting untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain nilai ekonomisnya, pohon berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan ekologi (Hastuti et al.. 2021).

Pengelolaan hutan menghadapi beberapa keterbatasan, termasuk ketimpangan penguasaan lahan. Hingga tahun 2017, korporasi mengelola 95,76% kawasan hutan, sedangkan masyarakat hanya memiliki 4,14% (Damarjati, 2018).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019) melaporkan bahwa 36,7 persen dari 25.863 desa berada disekitar kawasan hutan termasuk kategori miskin. Menurut data Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “58% dari seluruh

masyarakat miskin berada di sekitar hutan”(Mada, 2023).

Lemahnya partisipasi publik atas akses informasi yang masih terbatas membuat masyarakat terutama yang hidup disekitar maupun dalam kawasan hutan belum mengetahui informasi tentang kehutanan, dan program perhutanan sosial diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut.

Pada era Pemerintahan Presiden ke -7 program Perhutanan Sosial (PS) mengalami perkembangan penting dalam Kebijakan Nasional. Program PS telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), diiringi dengan lahirnya peraturan terkait PS seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 mengatur Perhutanan Sosial.

Program Perhutanan Sosial diperpanjang oleh pemerintahan Presiden terpilih dari tahun 2019 hingga tahun 2024, yang merupakan bagian dari UU CIPTAKER No. 11 Tahun 2020 dan peraturan yang menyertainya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial telah diubah menjadi peraturan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan Perhutanan Sosial.

Hingga 1 Oktober 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2022) melaporkan “target Perhutanan Sosial telah mencapai 5.087.754,07 hektare, yang memberikan manfaat bagi sekitar 1.127.815 kepala keluarga dari target awal 12,7 juta hektare dengan jumlah SK yang di terbitkan adalah sebanyak 7.694 Unit”, Pencapaian PS berdasarkan masing-masing skema adalah: “Hutan Desa seluas 2.013.017,21 hektare; Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 916.414,60 hektare; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 355.185,08 hektare; dan Kemitraan Kehutanan (KK), termasuk KK Kulin, seluas 571.622,38 hektare. Hutan Adat seluas 1.196.725,01 hektare

(108.576 hektare tergolong Hutan Adat dan 1.088.149 hektare tergolong kawasan hutan umum)”.

Program Perhutanan Sosial memungkinkan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan untuk memperoleh hak pengelolaan dari pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, “Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau lembaga adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, kelestarian lingkungan hidup, dan dinamika sosial budaya melalui Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Bersama, dan Kerjasama”.

Dengan persetujuan pemerintah, masyarakat di dalam dan sekitar hutan dapat mengelola dan memanfaatkan hutan sesuai dengan hak hukum yang diberikan oleh KLHK sehingga tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan meski bersatatus kawasan hutan. Pengelolaan dan pemanfaatan yang dimaksud tentu saja harus sejalan dengan maksud dan tujuan dari program PS yaitu melakukan pemanfaatan dengan cara-cara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang tenaga kerja bagi masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, dan untuk melaksanakan program ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus berkolaborasi (Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem).

Pengelolaan PS di KTH Mahau Lestari di Desa Sungai Penoban Provinsi Jambi dapat di jadikan lokasi penelitian. Sebagai pemegang izin PS KTH Mahau Lestari bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan areal izinnya. Penelitian ini dilakukan adalah untuk

melihat dampaknya ditingkat tapak ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi PS oleh KTH Mahau Lestari di Desa Sungai Penoban?
2. Bagaimana Dampak Ekonomi, Sosial dan Lingkungan bagi Anggota KTH Mahau Lestari?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui sistem pengelolaan PS yang dilaksanakan di KTH Mahau Lestari.
2. Mengidentifikasi dampak implementasi PS terhadap aspek ekonomi, aspek sosial serta aspek lingkungan di KTH Mahau Lestari..

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan data bagi para pemangku kepentingan. Bagi instansi yang telah mendapatkan izin Perhutanan Sosial, laporan ini memberikan informasi untuk menyeimbangkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya, serta meningkatkan tata kelola kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. Bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah bisa menjadi informasi bagaimana implementasi PS melalui skema HKm telah memberi dampak baik bagi masyarakat maupun lingkungan serta menjadi referensi dan bahan evaluasi dalam program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Bagi akademisi dan peneliti, menjadi referensi untuk penelitian sejenisnya serta menjadi dasar penelitian lanjutan dan bahan kajian dalam pengembangan program PS.

### **Keaslian Penelitian**

Penelitian terdahulu merupakan referensi dan bagian yang bisa dianalisis dengan tujuan mendapatkan kajian penelitian yang relevan dengan topik tesis ini, termasuk penelitian Salas (2020) tentang “persepsi masyarakat terhadap Perhutanan Sosial di RPH Singkil BKPH Ujung Krawang KPH Bogor”, penelitian ini menekankan bagaimana

sistem pengelolaan hutan dilaksanakan pada LMDH Minabakti.

Penelitian terkait PS juga pernah dilakukan oleh (Rahman, 2021) dengan topik penelitian Kontribusi PS terhadap Pendapat Petani Hutan di KPH Purwakarta, dalam penelitian yang menggunakan metode wawancara ini difokuskan pada petani yang tergabung dalam Lembaga Perhutanan Sosial LMDH Bambu Jaya melalui Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Sejalan dengan hasil penelitian ini, “tingkat kesejahteraan petani playstation LMDH Bambu Jaya cukup sesuai dengan garis kemiskinan Sajogyo dan masuk dalam kategori kesejahteraan sedang sesuai dengan indikator kesejahteraan BPS”.

Penelitian berkaitan dengan PS dilakukan oleh (Yuliani, 2021) mengangkat judul: “Dampak Perhutanan Sosial di LMDH Wono Asri KPH Kediri”. Dalam penelitian ini, “penulis mengkaji sistem penguasaan dan pengaruh playstation terhadap anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wono Asri (LMDH)”. Penulis menekankan bagaimana karakteristik masyarakat dalam kaitannya dengan pemahaman isu yang terjadi ditingkat tapak untuk mencapai prinsip dasar perhutanan, yaitu mencakup sosial, ekonomi dan lingkungan.

Perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan adalah pada lokasi dan masyarakat target penelitian, bentuk pengelolaan atau skema. Penelitian terdahulu pengelolaan PS melalui skema kemitraan kehutanan yang diberikan kepada kelompok masyarakat miskin yang berada didalam dan sekitar badan usaha yang sudah dibebani izin yaitu di areal konsesi badan-badan usaha kehutanan, swasta maupun pemerintah. Lokasi penelitian berada dalam KTH yang telah diberikan hak penguasaan PS berdasarkan inisiatif HKm, terutama ditujukan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu di dalam dan sekitar hutan atau kawasan hutan yang belum memiliki izin

penguasaan saat ini. (Permen 9/2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial)

## **2. METODOE PENELITIAN**

### **Waktu dan Tempat**

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Juli 2024 pada KTH Mahau Lestari, secara administratif KTH Mahau Lestari berada di Desa Sungai Penoban. Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi di ambil dengan pertimbangan KTH Mahau Lestari merupakan salah satu Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) melalui SK Nomor: SK. 5963/ MENLHK-PSKL/PKPS/P SL.0/9/2018. Izin PS pada KTH Mahau Lestari adalah seluas 172 hektar.

### **Alat dan Bahan**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, lembar kuisisioner, kertas flowchart dan spidol, kamera handphone dan laptop yang dilengkapi dengan program software Microsoft Office (Ms. Word dan Ms. Excel).

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif untuk menggali informasi yang aktual, sebagai indikator dan arah dari proses penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatan PS.

Penelitian ini memerlukan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara langsung dengan responden. Pengelola dan personel KTH Mahau Lestari menyediakan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai data sekunder (lembaga terkait) dan sumber informasi lainnya, termasuk bahan daring seperti artikel jurnal dan laporan.

Penelitian ini menerapkan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

a. Wawancara; Moleong (2016:186) mendefinisikan wawancara sebagai “komunikasi yang dilakukan dengan tujuan tertentu”. Menurut Suryani et al. (2018), “wawancara adalah percakapan antara dua orang: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawabnya”. Penelitian yang dijalankan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti harus memperoleh data dan informasi tambahan dari responden. Wawancara dengan informan dilakukan secara bebas, dipandu oleh serangkaian pertanyaan yang luas.

b. *Focus Group Discussion* (FGD); adalah metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis isu-isu spesifik mengenai topik yang sedang dibahas. FGD memberikan temuan tentang makna intersubjektif yang sulit ditafsirkan oleh peneliti secara independen karena bias subjektif. Jumlah peserta dalam FGD ini dapat berkisar antara 7 dan 12, yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan perspektif mereka dan memperoleh wawasan dari kelompok yang beragam.

### Teknik Pengambilan Sampel

Anggota kelompok HKM berfungsi sebagai unit analisis penelitian. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih responden, yang berarti individu dipilih secara sengaja. *Purposive sampling* adalah metode pemilihan non-acak di mana peneliti memilih peserta berdasarkan karakteristik spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian (Lenaini, 2021). Jumlah sampel ditentukan berdasarkan kebutuhan peneliti. Responden yang dipilih sebanyak 16 orang yang tergabung dalam anggota KTH Mahau Lestari dari total anggota 44 responden. Responden yang dipilih merupakan

pengurus dan anggota yang aktif dalam pengelolaan areal izin.

### Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, Menurut Kuncoro (2013) “analisis deskriptif memberikan gambaran umum tentang pola-pola yang konsisten dalam data yang dapat dianalisis dan dievaluasi dengan cepat namun bermakna”.

Data yang dikumpulkan dari *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara akan didokumentasikan secara deskriptif dan dinilai secara kualitatif. Menurut Sukmadinata (2006) “metode penelitian deskriptif dikenal karena mengungkap dan menjelaskan berbagai fenomena alam dan sosial yang ada dan muncul dalam masyarakat secara lebih spesifik, menyeluruh, dan mendalam”. . Kekhususan dalam hal ini berkaitan dengan tujuan keterkaitan, dampak, dan wawasan yang diperoleh dari tindakan-tindakan tersebut. Sugiyono menjelaskan “penelitian deskriptif diterapkan tidak hanya untuk menetapkan temuan-temuan yang luas tetapi juga untuk mendokumentasikan seluruh proses, dari penulisan laporan penelitian awal hingga kesimpulan akhir” (Mayang, 2022).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk analisis deskriptif, data berupa karakteristik responden, dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari pengelolaan PS.

Analisis pada dampak ekonomi yaitu analisis kontribusi pendapatan usaha tani PS terhadap pendapatan rumah tangga, yaitu besarnya nilai kontribusi pendapatan usaha tani PS terhadap pendapatan rumah tangga petani KTH Mahau Lestari ditentukan dalam satuan persen dengan menggunakan rumus menurut Rahman (2021):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan perhutanan sosial}}{\text{Pendapatan total rumah tangga}} \times 100\%$$

Dampak sosial dan lingkungan dilakukan analisis persepsi dengan menganalisis terkait dampak sebelum dan setelah adanya PS. Mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang dengan tingkat klasifikasi menjadi tiga kategori yaitu: mengetahui, tidak mengetahui, tidak berpendapat. Kategori tersebut digunakan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap kelembagan KTH pada dampak sosial, sementara pada dampak lingkungan digunakan pada indikator kerusakan hutan, potensi gangguan dan ancaman.

Nilai dampak implementasi PS di KTH Mahau Lestari terhadap aspek sosial dan lingkungan ditentukan dalam satuan persen menggunakan rumus menurut Yuliani (2021), yaitu dengan menggunakan penghitungan persentase persepsi dengan memperhatikan jumlah sampel pada tiap kategori ( $n_i$ ) dan jumlah seluruh sampel ( $N$ ). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{n_i}{N} \times 100\%$$

P = Persentase

$n_i$  = Jumlah sampel setiap kategori

N = Jumlah sampel

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisa Kebijakan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial mendefinisikan “Perhutanan Sosial sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di dalam hutan negara atau hutan adat yang dikelola oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, kelestarian lingkungan hidup, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Adat”.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa kebijakan gotong royong bersama dengan

skema HKm bertujuan untuk memberikan hak penguasaan kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan di kawasan hutan lindung dan/atau hutan produksi, terutama untuk pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian PS, maka sudah sangat jelas bahwa program perhutanan sosial merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan.

Berbeda dengan pendekatan pengelolaan hutan konvensional yang hanya fokus pada kayu atau konservasi alam saja, PS berusaha menyeimbangkan manfaat dan fungsi-fungsi hutan untuk perlindungan, konservasi, sosial dan ekonomi yang pada akhirnya berdampak bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bagi masyarakat pengelola. Serta upaya mengatasi konflik tenurial kawasan hutan, kesenjangan ekonomi masyarakat dan pencegahan dari peningkatan deforestasi dan degradasi hutan.

#### Sejarah Pengelolaan Hutan KTH Mahau Lestari

KTH Mahau Lestari terbentuk pada tahun 2018 berdasarkan surat keputusan kepala Desa Nomor 27 tahun 2018. Pembentukan KTH didasari atas keberadaan kawasan hutan produksi didesa Sungai Penoban yang merupakan lahan kritis dan terdegradasi akibat dari kebakaran dan pembalakan liar, kondisi ini yang mendorong masyarakat untuk mengusulkan PS (Profil KTH Mahau Lestari, 2021).

Permohonan KTH Mahau Lestasi disampaikan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan Nomor Surat 130/223/2008/2018. KTH Mahau Lestari mengajukan permohonan izin seluas  $\pm$  215 (Dua ratus Lima Belas) hektar pada kawasan hutan produksi tetap.

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor : BA.346/X-1/BPSKL-2/PSL.0/7/2018 tanggal 30 Juli 2018, terdapat pengurangan seluas  $\pm$  43 (Empat Puluh Tiga) hektar karena masuk pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan.

Atas dasar tersebut penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang di berikan kepada KTH Mahau Lestari hanya seluas  $\pm$  172 hektar pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, untuk 44 (Empat Puluh empat) Kepala Keluarga yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2018 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nomor: SK.5963/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pasal 22 ayat 7 menyebutkan bahwa ketentuan luasan per unit pengelola paling luas 5000 (lima ribu) hektar dan per kepala keluarga paling luas 15 (lima belas) hektar.

Penelitian ini menemukan distribusi lahan di HKM Mahau Lestari dengan klasifikasi luas lahan paling banyak pada luasan 1,5 – 2 ha. Semestinya, bila dibagi antara luasan persetujuan 172 ha dengan jumlah penggarap 44 kepala keluarga. Maka setiap kepala keluarga mengelola lahan seluas  $\pm$  3,9 ha. Jika dilihat dari skala luasan anggota HKM Mahau Lestari masih dibawah ketentuan maksimal per kepala keluarga yang ditetapkan didalam Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

Luasan garapan KTH Mahau Lestari dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan dengan klasifikasi luas lahan paling banyak ada pada luasan 1,5 – 2 ha sebanyak 12 orang atau sebesar 75 %, sementara penggarap dengan luas lahan 3 – 3,5 ha sebanyak 4 orang atau sebesar 25%. Menurut (Aji et al..2015) adanya pendapatan lain dari pekerjaan sampingan petani dapat menjadi salah satu faktor

penyebab dominasi luas lahan rendah (Yuliani, 2021). Selain itu kemampuan petani dalam mengelola lahan PS berbasis usaha kehutanan di HKM Mahau Lestari berpengaruh terhadap luas lahan garapan.

Pengelolaan lahan garapan PS pada HKM Mahau Lestari adalah untuk kegiatan agroforestri atau wanatani, yaitu mempraktikkan tanaman campur antara tanaman kehutanan dengan pertanian. Karakteristik agroforestri memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem pertanian tradisional (monokultur) terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Wattie et al..2023).

Praktik pengembangan tanaman dengan sistem agroforestri ini baru dimulai oleh kelompok setelah mendapatkan izin pada tahun 2018. Jenis tanaman kehutanan yang dikembangkan oleh kelompok pada areal tersebut adalah mahoni (*swietenia macrophylla*), kopi (*coffea canephora*), kemiri (*aleurites moluccana (L.) wild*), durian (*durio zibethinus*), karet (*hevea braziliensis*), duku (*lansium domesticum*), aren (*arenga pinata merr*), mangga (*mangifera nucifea*), jengkol (*Pithecellobium lobatum*), petai (*parkia speciosa*), jernang (*daemonorops sp*), cabai (*capsicum annum*), jahe (*zingiber officinale*) dan jeruk (*citrus sinensis*)

Pemanfaatan lahan di KTH Mahau Lestari dimulai dari penyiapan lahan sebelum memulai mengolah tanah. Penyiapan lahan adalah kegiatan untuk membersihkan rerumputan agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu dan tanaman dapat tumbuh dengan baik (Yuliani, 2021). Pembersihan lahan dilakukan sendiri oleh petani dengan menggunakan cangkul, sabit dan parang. Setelah itu, dilakukan pengolahan tanah untuk melunakkan struktur tanah dan memudahkan penanaman. Pengolahan tanah merupakan kegiatan fisik dan mekanis yang dilakukan untuk menyiapkan tanah bagi usaha tani guna memperbaiki media perakaran tanaman (Dahmayanti et al..2018).

Menurut hadiutomo (2012), sistem pengolahan tanah terbagi tiga, yaitu sistem

tradisional, semi mekanis, dan mekanis. Sistem tradisional dilakukan dengan alat sederhana yang digerakan manusia. Sistem pengolahan tanah semi mekanis dalam prakteknya menggunakan tenaga ternak, sedangkan pengolahan tanah mekanik dilakukan dengan menggunakan tenaga mesin. Petani hutan anggota KTH Mahau Lestari pengolahan tanah menerapkan sistem tradisional dan alat yang digunakan adalah cangkul.

Petani hutan KTH Mahau Lestari mendapatkan benih dengan cara membeli atau menyemai sendiri, petani juga mendapat benih melalui bantuan program pemerintah. Dari 16 responden menyatakan 80% petani mendapatkan bibit dari bantuan pemerintah dan sekitar 20 % dengan melakukan penyemaian sendiri.

Kegiatan penanaman dilakukan sendiri oleh petani hutan. Namun sebanyak 18,75 % petani hutan juga menyewakan buruh tani, dan sebanyak 18,75 petani melakukan penanaman dengan cara bergotong royong. Gotong royong merupakan bentuk kerja sama masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan melalui musyawarah dan mufakat (Effendi, 2013).

Perawatan dan pemeliharaan tanaman petani dilakukan dengan pemupukan yang berfungsi untuk meningkatkan hasil panen, Sebanyak 56,25 % dari 16 responden melakukan pemupukan dalam usahatani menggunakan pupuk kimia, dan sebanyak 37,5% menggunakan pupuk organik. Sisanya sebesar 6,25% tidak melakukan pemupukan.

Pemeliharaan dan perawatan selanjutnya yaitu penyiangan dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan untuk membersihkan tanaman pengganggu agar tanaman yang ditanam oleh petani dapat tumbuh dengan baik (Oktaviyani et al..2017). Petani di KTH Mahau Lestari melakukan penyiangan menggunakan teknik manual yaitu menggunakan alat seperti parang, sabit dan cangkul, maupun tanpa alat. Sementara untuk pengendalian hama dan penyakit 100 % petani menggunakan pestisida.

Dari 16 responden pengelola di KTH Mahau Lestari hanya sekitar 43,75% yang sudah melakukan pemanenan, ini disebabkan kegiatan penggarapan lahan dan penanaman baru dimulai oleh petani di KTH Mahau Lestari pada tahun 2021, Sebanyak 56,25 % belum melakukan pemanenan. Pemanenan dilakukan sendiri oleh petani hutan, dikarenakan produksi hasil hutan dari program PS masih skala kecil.

Pemasaran produk pertanian dari masyarakat pengelola HKm saat ini hanya dijual ke masyarakat desa dan sebagian di jual kepada tengkulak. Tengkulak adalah pengepul yang membeli hasil panen dari petani dan menyalurkannya ke agen – agen besar (Megasari, 2019).

### **Karakteristik Responden**

Karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan jumlah tanggungan keluarga. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang. Karakteristik responden dapat mendeskripsikan keadaan sosial pada KTH sebagai pengelola HKm.

### **Karakteristik Responden berdasarkan Usia**

Sebaran umur responden dilokasi penelitian, ialah berkisar umur 22 sampai dengan 56 tahun. Masa usia produktif seseorang adalah direntang usia 15 sampai dengan 64 tahun sedangkan usia tidak produktif adalah dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun (Badan Pusat Statistik, 2013).

Penelitian ini menemukan umur responden yang termuda adalah 22 tahun, dan umur tertua adalah 56 tahun. Kelompok umur terbanyak adalah pada umur 41 – 50 tahun dengan jumlah 8 responden atau sebesar 50%. Ini menunjukkan bahwa petani hutan di KTH Mahau Lestari memiliki sebaran umur produktif dalam pengelolaan HKm.

### Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Anggota HKm Mahau Lestari memiliki tingkat pendidikan yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan akan mempengaruhi pengetahuan petani hutan untuk meningkatkan pengelolaan hutan sosial. Menurut Hidayat et al (2017) semakin tinggi pendidikan petani, semakin besar kinerja yang dicapai dalam suatu pengelolaan karena pengetahuan yang dimiliki. Namun dalam penelitian ini tingkat pendidikan tidak membatasi kemampuan dalam mengelola lahan PS.

Tingkat pendidikan terakhir responden berdasarkan klasifikasi pendidikan formal responden terbanyak tingkat pendidikan SMA dengan jumlah 6 responden atau sebesar 37%, terendah tingkat tidak tamat SD dengan jumlah 1 orang atau sebesar 6,25%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi pengelolaan hutan bisa didorong karena adanya faktor eksternal seperti intensitas penyuluhan, kelembagaan atau fungsi kelompok tani, dan akses informasi akan memberi pengaruh bagi peningkatan kualitas petani dalam pengelolaan hutan (Sudrajat et al.. 2016).

### Karakteristik Responden berdasarkan Tanggungan Keluarga

Jumlah anggota keluarga yang ditanggung oleh masing-masing responden dapat memengaruhi motivasi dan daya nalar kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini mencerminkan tingkat ekonomi keluarga dan adanya anggota keluarga tambahan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari (Kadir et al..2012).

Tanggungan keluarga dibagi menjadi 3 kategori: kecil (1-3 orang), sedang (4-6 orang), dan besar (lebih dari 6 orang). Jumlah tanggungan dipengaruhi oleh faktor lokal, pendidikan, dan budaya (Purwanto et al..2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50 % responden di KTH Mahau Lestari memiliki tanggungan keluarga kecil, sedangkan jumlah tanggungan keluarga sedang adalah sebesar 37,5%, ditemukan juga responden yang belum memiliki tanggungan sebesar 12,5 %. Tidak ditemukan responden yang memiliki tanggungan keluarga lebih dari 6 orang (tanggungan keluarga besar).

### Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan Utama

Pekerjaan utama responden disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan pekerjaan utama responden didominasi oleh petani yakni sebanyak 13 orang atau sebesar 81,25%. Kondisi ini didukung oleh lokasi pemukiman masyarakat yang berada disekitar hutan, selain itu masih banyak tersedianya lahan menjadi faktor bagi masyarakat melakukan usaha pada sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama. 12,5 % pekerjaan utama sebagai buruh, dan sebesar 6,25% yang memiliki pekerjaan utama sebagai pedagang,

**TABEL 1.**  
JENIS PEKERJAAN

No	Jenis pekerjaan	Jumlah responden	Persentase (%)
1	Petani	13	81,25 %
1	Buruh	2	12, 5 %
2	Pedagang	1	6, 25 %
Jumlah		16	100 %

(Sumber: Olah Data Primer 2024)

### Dampak Sosial Perhutanan Sosial

Dampak sosial dilihat dari persepsi masyarakat di KTH Mahau Lestari menjadi salah satu faktor kunci yang akan menentukan perilaku responden dalam pengelolaan PS Ada beberapa aspek yang dianalisis tentang persepsi petani hutan, meliputi pengetahuan tentang PS dan bagaimana mendapatkan informasi tentang PS. Persepsi anggota KTH Mahau Lestari terhadap PS dapat dilihat dalam Tabel 2.

**TABEL 2.**  
DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL

No	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mengetahui	16	100%
1	Tidak Mengetahui	0	0
2	Tidak Berpendapat	0	0
Jumlah		16	100 %

(Sumber: Olah Data Primer 2024)

Pengetahuan responden tentang PS dibagi dalam 3 (tiga) kategori yakni mengetahui, tidak mengetahui dan tidak berpendapat. dari tabel diatas semua responden mengetahui tentang PS bearti mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan HKm. Artinya pengetahuan tentang HKm dapat diterima dan diserap dengan baik oleh petani hutan. Responden mengatakan dengan adanya program PS petani mengetahui tujuan dari Hkm.

Petani mendapatkan pengetahuan mengenai PS dan hutan kamasyarakat didapat dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden dilokasi penelitian memperoleh informasi terkait pengetahuan terhadap PS dari Yayasan CAPPK Keadilaan Ekologi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, KPH Tanjung Jabung Barat dan BPSKL (Balai Perhutanan Sosial dan kemitraan Lingkungan) wilayah Sumatera.

Hasil penelitian menunjukan pada perubahan perilaku dari masyarakat, sebelumnya ada oknum masyarakat yang mempunyai kebiasaan buruk terhadap kawasn hutan seperti melakukan pembalakan liar, membuka lahan dengan membakar. saat ini perilaku dimasyarakat sudah berubah dan berkomitmen untuk berperan aktif dan bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan guna mensukseskan pelaksanaan program PS.

Kearifan lokal yang masih dilakukan oleh anggota kelompok Tani Mahau Lestari adalah gotong royong, dengan bekerjasama dan melakukan musyawarah setiap ada program yang akan dijalankan dan melakukan evaluasi terhadap

program yang merupakan program kelompok. Gotong royong merupakan upaya memperkuat interaksi sosial diantara petani untuk bisa bertukar pendapat, pemecahan masalah demi kepentingan bersama, dan bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama.

Pemanfaatan hasil hutan setelah PS yang dimanfaatkan oleh petani di KTH Mahau Lestari seperti kopi, cabe, jeruk manis, pinang, pisang, keladi dan nangka. Petani di KTH Mahau Lestari memanfaatkan hasil hutan tersebut dengan frekuensi yang berbeda tergantung dengan usahatani yang dijalankan. Seperti yang disajikan Tabel 3.

**TABEL 3.**  
HASIL HUTAN

No	Jenis	Volume	Frekuensi
1	Kopi	3 – 5 kg	12 kali/tahun
2	Cabe	13 kg	12 kali / tahun
3	Jeruk manis	200 kg	2 kali/tahun
4	Pinang	20 kg	4 kali/tahun
5	Pisang	3 Tandan	12 kali/tahun
6	Keladi	5 kg	12 kali/tahun
7	Nangka	5 buah	12kali/tahun

(Sumber: Olah Data Primer 2024)

Seluruh petani menyatakan hasil pemanfaatan hasil hutan dari PS pemanfaatannya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual.

### Dampak Ekonomi Perhutanan Sosial

Program perhutanan sosial salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikawasan hutan. Hasil penelitian ini ingin melihat seberapa jauh program PS memberi dampak ekonomi dalam peningkatan sumber pendapatan pada anggota KTH Mahau Lestari.

Dampak ekonomi dengan adanya HKm belum begitu dirasakan oleh anggota kelompok, dikarenakan areal izin HKm yang diberikan kepada anggota KTH Mahau Lestari merupakan kawasan

hutan yang sama sekali belum ada lahan garapan yang dikelola oleh petani. Hal ini dikarenakan petani anggota KTH Mahau Lestari terlebih dahulu harus menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tahapannya dimulai dengan identifikasi potensi, pemetaan zonasi areal persetujuan dan penyusunan dokumen RKPS sampai dengan pengesahan oleh pihak Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sumatera, semua proses ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Sehingga kegiatan budidaya yang diusahakan dilahan hutan ini baru dimulai oleh petani dari tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara, Semua responden (100 %) menyatakan tidak ada pemanfaatan hasil hutan yang diusahakan sebelum adanya PS. Peneliti juga menggali sumber pendapatan rumah tangga petani sebelum ada PS dibagi dalam dua kelompok yaitu usaha berbasis lahan dan non lahan.

Pendapatan rumah tangga petani berbasis lahan pada KTH Mahau Lestari kesuluruhannya bersumber dari tanaman sawit dengan sistem monokultur dengan rata-rata pendapatan yang berbeda diantara petani begitu juga dengan pendapatan dari usaha non lahan. Pendapatan rumah tangga petani usaha berbasis lahan dan non lahan ditunjukkan dalam Tabel 4.

**TABEL 4.**  
PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI

No	Rentang pendapatan petani Rp/KK/Bulan	Jumlah Responden	Persentase (%)
	Berbasis Lahann		
1	1.00000 – 400000	8	50,00 %
2	5.000.000 – 8.00000	2	33,33%
3	9.000.000 – 12.000000	2	12,5 %
4	0	4	25 %
Jumlah		16	100 %
Non lahan		Jumlah Responden	Persentase (%)
1	400.000 –1000000	9	56,25 %

2	1.500.000 – 3.000.000	5	31,25 %
3	4.000.000 – 6.000.000	2	12,5%
Jumlah		16	100 %

(Sumber: Olah Data Primer 2024)

Dari 16 responden hanya 12 (dua belas) orang yang memiliki pendapatan dari usaha berbasis lahan, Responden dengan penghasilan terbesar ada di rentang pendapatan Rp. 1000.000 sampai Rp. 4.000.000 atau sebesar 50 %, sementara 4 orang atau sebesar 25% tidak ada pendapatan. Sebanyak 5 orang atau sebesar 31,25% direntang pendapatan Rp. 1.500.000 sampai Rp. 3.000.000, sementara rentang penghasilan yang cukup tinggi yaitu rentang Rp 4.000.000 sampai Rp. 6.000.000 sebesar 12,5% atau sebanyak 2 orang. Semua responden menyatakan memiliki pendapatan dari usaha non lahan, terbsesar ada pada rentang pendapatan Rp. 400.000 sampa Rp. 1000.000 atau sebesar 56,25 %.

Hasil penelitian dari 16 responden hanya 8 orang yang sudah mendapatkan tambahan pendapatan rumah tangga setelah ada PS, selebihnya masih pada tahap melakukan penanaman dan menunggu panen. Kontribusi PS pada anggota KTH Mahau Lestari di sajikan dalam Tabel 5.

**TABEL 5.**  
KONTRIBUSI PS PADA ANGGOTA KTH MAHAU LESTARI

No	Nama	Pendapatan Petani Sebelum Perhutanan Sosial/Tahun	Pendapatan Perhutaan Sosial /Tahun	Persentase (%)
1	Samsul	55.200.000	3.000.000	5,43 %
2	Bertua Sibarani	69.600.000	1.800.000	2,58 %
3	Tondri Sibutar-butur	60.000.000	6.000.000	10 %
4	Bayu Kesuma	48.000.000	4.800.000	10.%
5	Maradona	46.800.000	2.400.000	5,12 %
6	Nurcahya	42.000.000	2.400.000	5,71 %
7	Esterlina Br Sinaga	36.000.000	6.000.000	16,66 %

8	Mahmud Aziz	12.000.000	1.800.000	15 %
Jumlah		369.600.00	28.200.000	7,62 %

(Sumber: Olah Data Primer 2024)

Besaran kontribusi peningkatan pendapatan PS terhadap 8 responden anggota KTH Mahau Lestari adalah sebesar 7,62 % atau sebesar Rp. 28.200.000/tahun. Nilai ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian Rahman (2021) dimana nilai kontribusi pendapatan rumah tangga petani LMDH Bambu Jaya di KPH Purwakarta yaitu sebesar 11,85%.

### Dampak Lingkungan Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial juga diharapkan mampu memberi dampak baik pada lingkungan. Relasi yang baik antara masyarakat dengan hutan tentu berdampak baik pada keberlangsungan PS

Penelitian ini menunjukkan bahwa program PS telah memberi dampak pada aspek lingkungan di lokasi HKm Mahau Lestari. Aspek lingkungan tercermin dari berkurangnya peristiwa kebakaran hutan dan peristiwa longsor. Kondisi lingkungan juga bisa dilihat dengan kegiatan pengayaan tanaman dan bagaimana masyarakat di KTH Mahau Lestari melakukan tindakan untuk kegiatan pemulihan kawasan dan melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran hutan.

Praktik memperbaiki kondisi lingkungan oleh masyarakat di KTH Mahau Lestari terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan, berdasarkan wawancara dengan 16 responden rata-rata menyatakan bahwa saat ini yang dilakukan oleh petani untuk perbaikan tutupan hutan adalah dengan melakukan penanaman pada areal kritis dengan berbagai jenis tanaman dan menerapkan sistem agroforestri. Sementara untuk mengatasi terjadinya kebakaran hutan dan pembalakan liar (*illegal logging*) masyarakat juga melakukan patroli rutin di kawasan Izin Usaha

Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) sebanyak 2 kali dalam satu bulan

Hasil penelitian juga menunjukkan penurunan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan peristiwa longsor pada areal HKm KTH Mahau Lestari, dari 16 responden menyatakan sebelum ada PS sering sekali terjadi kebakaran pada kawasan HKm, setelah adanya PS peristiwa kebakaran pada kawasan hutan di lokasi tersebut sudah tidak lagi terjadi, Sementara untuk peristiwa longsor pada kawasan hutan dari 16 responden menyatakan intensitas longsor sudah mulai berkurang semenjak masyarakat mulai melakukan penanaman berbagai jenis tanaman pada areal kritis dan kegiatan rehabilitasi yang terus dilakukan oleh masyarakat.

### SIMPULAN

#### 1. Sosial:

Program Perhutanan Sosial menjadi solusi bagi petani dalam menjamin legalitas hukum untuk pemanfaatan kawasan hutan, selain itu juga memberi dampak pada perubahan perilaku dalam membuka lahan tanpa membakar, peningkatan pengetahuan terhadap perhutanan sosial dan menguatnya budaya gotong royong.

#### 2. Ekonomi

Perhutanan sosial telah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pada petani anggota di KTH Mahau Lestari sebesar 7,62%. Dampak positif lain pada sisi ekonomi adanya penyerapan tenaga kerja dan pengembangan peluang usaha bagi petani di KTH Mahau Lestari.

#### 3. Lingkungan

Secara ekologi sistem agroforestri akan membantu meningkatkan angka tutupan hutan serta vegetasi menjadi multikultur. Selain itu upaya menyelamatkan lingkungan adalah dengan melakukan praktik mitigasi melalui patrol rutin.

**SARAN**

1. Penelitian ini dapat membantu pihak terkait memberikan dukungan dan bantuan yang tepat pada KTH Mahau Lestari berupa kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang mampu meningkatkan skill dan keterampilan anggota kelompok tani dalam mengembangkan usaha berbasis tanaman kehutanan untuk lebih berinovasi dalam menghadapi persaingan pasar.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah variabel independent lainnya yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga petani untuk menambah variasi penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistika Republik Indonesia.
- Dahmayanti, P., Febriani., W. M., & Lekat, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengolahan Tanah Dan Pemberian Macam Bahan Organik Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jahe Gajah. *Jurnal Of Applied Agriculture Science And Tecnology*, 1 (1): 202-26 (2018). <https://media.neliti.com/media/publications/277318-pengaruh-sistem>.
- Damarjati, D. (2018). Menteri LHK Beberkan Hasil Atasi Ketimpangan Penguasaan Hutan, *detiknews* Rabu, 14 April 2018. <https://news.detik.com/berita/d-3952129/menteri-lhk-beberkan-hasil-atasi-ketimpangan-penguasaan-hutan>.
- Effendi, T. N. (2013). Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam perubahan Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 2 No.1, Mei 2023
- Hastuti., Mappamiring, M., & Abdi, A. (2021). Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enrekang. *Jurnal.unismuh.ac.id*, Volume 2, Nomor 1, Februari.2021.
- <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kim/ap/index>
- Hidayat, T., Yulida, R., & Rosnita. (2017). Karakteristik petani padi peserta program upaya khusus padi jagung kedelai upsus pajale di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. *J. Online Mhs. Fak. Pertan.* 4(1):1-12. <https://media.neliti.com/media/publications/200692-karakteristik-petani-padi-peserta-progra.pdf>
- Instruksi Presiden No. 4/2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Kadir, A., Awang, S.A., Purwanto, H.R., & Poedjiharajoe, E. (2012). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 19 (1): 1-11.
- [KLHK] Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: SK.5963/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/9/2 018)
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022. Capaian Perhutaann Sosial Sampai Dengan 1 Oktober 2022.
- Kuncoro, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling, *Jurnal Historiis, Jurnal kajian, Peneelitain & pengembangan Pendiakn Sejarah, Program Studi pendidiakn Sejarah FKIP UM Mataram*, 2021 <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/4075>
- Mada, M. (2023). Menggali Akar kemiskinan Masyarakat Kawasan hutan. *Koran Tempo*, 17 November 2023. <http://koran.tempo.co/read/lingkungan/485605/mengapa-masyarakat-kawasan-hutan-miskin>.
- Mayang, S. (2022). Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya. Info

- Sevma – 21 Apr 2022.  
<https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/>
- Megasari, A. L (2019). Ketergantungan Petani terhadap tengkulak sebagai patron dalam kegiatan proses produksi Pertanian (Kasus di Desa Baye kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). Skripsi. Universitas Airlangga Surabaya
- Oktaviani, ES., Indriyanto., & Surnayanti. (2017). Identifikasi jenis tanaman hutan rakyat dan pemeliharannya di hutan rakyat Desa Kelungu Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus. *J. Sylva Lestari*. 5(2):63–77. doi:10.23960/jsl2563-77.
- Putri, A.D., & Setiawani, N. R. (2013). Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Bebandem. *E-Jurnal EP Unud*, 1[4] ; 173 - 180  
<https://media.neliti.com/media/publications/44604-ID-pengaruh-umur-pendidikan-pekerjaan-terhadap-pendapatan-rumah-tangga-miskin-di-de.pdf>.
- Purwanto A., & Taftazani BM. 2018. Pengaruh jumlah tanggungan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga pekerja K3L Universitas Padjadjaran. *Focus J.Pekerj. Sos.* 1(2):33–43. doi:10.24198/focus.v1i2.18255.
- Santoso, H., & Purwanto, E. (2021). Masyarakat Hutan dan Negara, Tropenbos Indonesia Bekerjasama dengan Interlude, Yogyakarta.
- Sudrajat A., Hardjanto., & Sundawati L. (2016). Partisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat lestari: kasus di Desa Cikeusal dan Desa Kananga KabupatenKuningan. *Jurnal Silvikultur Tropika* Vol. 07 N0. 1, April 2016, Hal 8-17 ISSN:2086-2087
- Suryani, I., Bakiyah, H., & Isnaeni, M. (2018). Strategi *Public Relations* PT Honda Megatama Kapuk dalam *Customer Relations*. *Ejurnal*, Vol 9 No.9, 2018. <https://ejournal.bsi.ad.id>
- Winata, D. K. (2019). KLHK Identifikasi Ribuan Desa di Kawasan Hutan, *Media Indonesia*. Minggu 10 Maret 2019. <https://mediaindonesia.com/humaniora/221945/klhk-identifikasi-ribuan-desa-di-kawasan-hutan>.